

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan. Berdasarkan hasil analisis dari Bab 5, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana PKH di wilayah ini telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Kesimpulan yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan penerima bantuan didasarkan pada DTKS yang disusun oleh desa dan ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Dengan mengikuti prinsip *good governance* ini, tahap perencanaan PKH dapat mencerminkan akuntabilitas yang tinggi, karena setiap langkah dalam perencanaan dilaksanakan dengan transparansi, kejelasan prosedur, partisipasi aktif, serta pengawasan yang ketat. Semua pihak terkait dapat memantau, mengontrol, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan tujuan program.

2. Tahap Pertemuan Awal Dan Validasi Data

Pertemuan awal diadakan untuk memverifikasi apakah data yang tercantum dalam DTKS sesuai dengan kondisi terbaru KPM, sehingga

dapat diperoleh data yang akurat untuk dasar pemberian bantuan kepada calon penerima.

3. Tahap Penetapan KPM

prosedur pelaksanaan dan penyaluran masyarakat kelurahan Buraen, mereka mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sebagaimana yang dimaksud bahwa tahap pertama adalah validasi data calon penerima bantuan manfaat PKH, observasi secara langsung masyarakat secara langsung menunjukkan bukti dan fakta yang nyata bahwa masyarakat Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi selatan berhak menerima bantuan PKH.

4. Tahap Penyaluran Dana Bantuan

Pemantauan Pencairan Bantuan PKH Bantuan PKH dapat dicairkan melalui ATM di bank yang bekerja sama, seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri. KPM wajib menyimpan bukti penarikan sebagai dokumen yang sewaktu-waktu bisa diminta oleh Pendamping PKH untuk keperluan pengecekan dan pelaporan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pemantauan oleh Kementerian Sosial guna memastikan bahwa dana bantuan benar-benar diterima oleh KPM.

5. Tahap Pemuktahiran Data

Pemuktahiran data dilakukan untuk memastikan data KPM selalu up-to-date dan akurat. Penelitian oleh Nur Fahira Syamsir (2018) menyebutkan bahwa pemutakhiran data penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi KPM, sehingga bantuan tetap relevan dan efektif. Hasil

analisis menunjukkan pentingnya pemutakhiran data untuk menjaga relevansi dan efektivitas program bantuan.

6. Tahap Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen memastikan bahwa KPM memenuhi kewajiban terkait dengan penggunaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Penelitian oleh Eka Rifka Fransiska (2022) menunjukkan bahwa verifikasi komitmen penting untuk memastikan bantuan sosial memberikan dampak yang diharapkan pada kesehatan dan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan pentingnya verifikasi komitmen dalam mencapai tujuan program bantuan sosial.

7. Tahap Transformasi Kepesertaan

Transformasi kepesertaan melibatkan pendataan ulang dan evaluasi kondisi sosial ekonomi KPM setelah menerima bantuan selama periode tertentu.

6.2 Saran

1. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Transparansi dalam proses penyaluran bantuan perlu ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan serta mekanisme pengaduan harus diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat dapat turut serta dalam proses pengawasan.

2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pendamping Sosial

Pendamping sosial memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan PKH.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pendamping sosial agar mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

3. Evaluasi Berkala

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program PKH perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Hasil evaluasi ini harus dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaan program ke depan.

Dengan adanya peningkatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan penyaluran dana bantuan PKH di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima bantuan.